

ABSTRAK

Berbagai produk kosmetika dapat dengan mudah ditemukan di *marketplace* daring. BPOM sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan pengawasan terhadap obat dan makanan termasuk kosmetika yang beredar di Indonesia, perlu melakukan pengawasan secara daring dalam upaya mencegah peredaran produk yang tidak terjamin kualitas dan mutunya. Produk *The Ordinary AHA 30% + BHA 2% Peeling Solution* dengan kandungan AHA 30% yang dilarang oleh BPOM hingga kini dapat dengan mudah ditemukan di *marketplace*. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui peraturan perundang-undangan dan kepustakaan yang diolah dengan analisis kualitatif dengan mengacu kepada teori pertanggungjawaban hukum oleh Hans Kelsen. Setelah dilakukan analisis terhadap permasalahan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, diperoleh hasil yaitu pengawasan BPOM terhadap peredaran produk kosmetika dengan kandungan yang dilarang secara daring dilakukan dalam bentuk pengawasan terhadap produk yang beredar dan penindakan terhadap pelaku usaha dan penyelenggara sistem elektronik yang mengedarkan produk tersebut. BPOM bertanggung jawab secara kolektif atas beredarnya produk perawatan kulit dengan kandungan AHA 30%. Tanggung jawab BPOM terhadap peredaran kosmetika dengan kandungan AHA 30% secara daring belum terpenuhi mengingat fakta bahwa produk ini masih beredar bebas di berbagai *marketplace*.

Kata kunci: Pengawasan BPOM, kosmetika, AHA, daring

ABSTRACT

Various cosmetic products can be easily found in online marketplaces. BPOM as a government institution that carries out supervision of the distribution of drugs and food including cosmetics in Indonesia, needs to carry out online supervision to prevent the distribution of products which has unguaranteed quality. The Ordinary AHA 30% + BHA 2% Peeling Solution product with 30% AHA content which is prohibited by BPOM, can be easily found in the marketplace. This research is a normative juridical using statutory approach which is carried out by examining laws and other regulations related to the legal issues. The sources of data in this study were obtained through laws and regulations and literature which were processed by qualitative analysis with reference to the theory of legal responsibility by Hans Kelsen. After analyzing the problems with the relevant laws and regulations, the results are that BPOM's supervision of the online distribution of cosmetic products which content is prohibited is carried out in the form of supervision of circulating products and taking action against businessperson and electronic system operators who distribute these products. BPOM is collectively responsible for the distribution of cosmetic products with 30% AHA content. BPOM's responsibility to the online distribution of cosmetics with 30% AHA content has not been fulfilled considering the fact that these products are still distributed freely in various marketplaces.

Keywords: BPOM's supervision, cosmetics, AHA, online